

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya, manusia terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Perbedaan gender, suku, etnik, agama, bahasa, budaya menjadi hal yang tidak dapat dihindari oleh individu manapun. Perbedaan-perbedaan yang terjadi akan memberikan pengaruh atau dampak dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah perubahan tatanan sosial kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan munculnya Negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan politik memiliki beberapa unsur pembentuk, salah satunya adalah adanya rakyat. Menurut pendapat para ahli, konteks rakyat yang dimaksud adalah warga negara. Adanya warga negara juga sebagai unsur pokok dan wajib dimiliki oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemajemukan yang ada di Indonesia berpedoman kepada Pancasila. Dengan berpedoman kepada Pancasila, kemajemukan yang ada di Indonesia dapat dipersatukan. Kemajemukan yang berpedoman kepada Pancasila diharapkan dapat memberikan hal yang positif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun salah satunya adalah mencapai tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 tersebut, salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun cara mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya adalah melalui Pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003). Berdasarkan UU tersebut, salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk menginternalisasi dan menguatkan karakter.

Adapun karakter yang perlu diinternalisasi adalah karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Secara umum, karakter kewarganegaraan terdiri dari karakter publik dan karakter privat. Karakter publik terdiri dari tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Sedangkan karakter privat, terdiri dari kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan hukum (*rule of law*), berpikir kritis, kemauan untuk mendengar.

Karakter kewarganegaraan ini diharapkan dapat melekat kuat dalam diri setiap warga negara, termasuk siswa. Siswa sebagai generasi muda penerus bangsa diharapkan mampu memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat agar memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam kenyataannya, pada saat ini karakter kewarganegaraan dalam diri warga negara perlahan mulai memudar dan melemah, terutama dalam diri siswa.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat ada 229 kasus tawuran pelajar sepanjang Januari-Oktober tahun 2013. Jumlah ini meningkat sekitar 44 persen dibanding tahun 2011 yang hanya 128 kasus. Dalam 229 kasus kekerasan antarpelajar SMP dan SMA itu, terdapat 19 siswa meninggal dunia (Sari, 2014, hal. 15).

Menurut hasil riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (2011), menyatakan bahwa tingkat kekerasan pelajar dalam bentuk tawuran di JABODETABEK cukup signifikan. Meskipun tindakan siswa untuk terlibat tawuran mayoritas disebabkan sebagai ungkapan solidaritas dalam pertemanan, namun jumlahnya mencapai 14.4% (setuju tawuran), 11.4% (bersedia tawuran) dan 8.5% (pernah terlibat dalam tawuran). Temuan lain menunjukkan hasil positif bahwa sebanyak 98.7% siswa merasa sangat bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia, dan 98% siswa lebih mengutamakan untuk membeli produk Indonesia ketimbang produk negara lain. Namun ketika ditanya tentang sistem demokrasi yang saat ini dijalankan oleh negara Indonesia, 59.8% siswa merasa bahwa sistem demokrasi saat ini adalah yang paling tepat, tetapi dengan catatan ada sebanyak 21.1% guru agama dan 25.8%

siswa yang menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara (Baedowi, 2013, hal. 67-68).

Selain data mengenai kasus tawuran diatas, terdapat kasus lain yang menjadi tanda melemahnya karakter kewarganegaraan, yakni Radikalisme dan Terorisme. Gaus (2013) dalam penelitiannya tentang *Pemetaan Problem Radikalisme Dikalangan Pelajar SMA di 50 SMA Negeri di Empat Kota* pada tahun 2011, mendapatkan data bahwa pelajar saat ini memiliki kecenderungan untuk menginternalisasi pandangan-pandangan radikal yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya dari kelompok-kelompok radikal untuk masuk ke lingkungan sekolah untuk menyebarkan paham sekaligus merekrut anggota dari kalangan pelajar. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok radikal ini dimungkinkan karena pihak sekolah pada umumnya cenderung terbuka kepada pihak-pihak dari luar, termasuk kepada kelompok-kelompok radikal. Kesadaran kerohanian yang tidak diimbangi dengan kesadaran kewarganegaraan yang memadai yang umumnya menguat di SMA Negeri di 4 daerah itu, menjadi titik yang rawan bagi masuknya kelompok garis keras yang akan mentransformasikannya menjadi kekuatan yang destruktif, anti toleransi, dan membungkam keragaman. Secara umum penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan radikalisme sedang sangat gencarnya berhembus dan dihembuskan melalui institusi pendidikan umum negeri, terutama setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (Darraz, 2013, hal. 157).

Penelitian yang dilakukan oleh MAARIF Institute (2011) menunjukkan adanya upaya dari kelompok-kelompok radikal untuk masuk ke lingkungan sekolah guna

menyebarkan paham mereka dan merekrut anggota dari kalangan pelajar. Gerakan mereka ini dimungkinkan karena pihak sekolah pada umumnya cenderung terbuka kepada pihak-pihak dari luar, termasuk kepada kelompok-kelompok radikal (Gaus, 2013, hal. 180).

Mufid (2011) dalam penelitiannya tentang *Executive Summary of Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*, mendapatkan data bahwa usia remaja dari masa Sekolah Menengah Umum hingga 30 tahun merupakan usia yang dinilai sangat rentan terhadap aksi terorisme. Tercatat sebanyak 59% menunjukkan bahwa pelaku terorisme berada di rentang usia remaja hingga 30 tahun (Sukabdi, 2013, hal. 83-84).

Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan<sup>1</sup>, menunjukkan bahwa melemahnya karakter kewarganegaraan juga dialami oleh Siswa SMAN 4 Kota Tangerang Selatan. Contoh kasus yang peneliti amati adalah masih terdapat siswa yang berperilaku tidak sopan terhadap guru, pegawai tata usaha, satpam, dan petugas kebersihan. Selain itu, banyak siswa yang tidak berpakaian dengan rapih.

Berdasarkan data, hasil penelitian, dan observasi pendahuluan diatas, menunjukkan bahwa terjadinya pelemahan karakter toleransi, mengikuti aturan hukum, kepedulian, tanggung jawab sosial, kesopanan dan disiplin dalam diri siswa. Karakter-karakter tersebut merupakan karakter kewarganegaraan yang harus

---

<sup>1</sup> Observasi dilakukan pada 7 Januari 2019

dimiliki setiap warga negara. Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu adanya penguatan karakter kewarganegaraan oleh lembaga pendidikan terutama Sekolah.

Sekolah sebagai satuan pendidikan formal di Indonesia yang memiliki posisi kuat dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki tujuan utama, salah satunya adalah menginternalisasi atau menguatkan karakter siswa. Berkaitan dengan pembinaan karakter, Pemerintah RI telah mengeluarkan UU No.87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Dalam peraturan tersebut, Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa untuk memperkuat dan membina karakter kewarganegaraan siswa, maka SMAN 4 Kota Tangerang Selatan sebagai satuan pendidikan formal telah melaksanakan amanah UU No.87 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan penguatan pendidikan atau pembinaan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan internalisasi dan penguatan karakter melalui kegiatan intrakurikuler salah satunya melalui pembelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai internalisasi nilai karakter kewarganegaraan siswa melalui pembelajaran PPKn di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, demi kepentingan penelitian maka peneliti perlu memfokuskan penelitian ini agar penelitian menjadi fokus dan terarah. Maka penelitian ini difokuskan pada internalisasi nilai karakter kewarganegaraan siswa melalui pembelajaran PPKn di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKn di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana internalisasi nilai karakter kewarganegaraan siswa melalui pembelajaran PPKn di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan?
3. Apa karakter kewarganegaraan yang berhasil terinternalisasi dalam diri siswa melalui pembelajaran PPKn di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan?
4. Bagaimana dampak internalisasi nilai karakter kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn bagi siswa SMAN 4 Kota Tangerang Selatan?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Dapat memberikan kontribusi sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan internalisasi nilai karakter kewarganegaraan siswa melalui pembelajaran PPKn.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan penulis mengenai internalisasi nilai karakter kewarganegaraan siswa melalui pembelajaran PPKn.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.